

**KINERJA DINAS PEMBERAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI  
DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

Ruth Rosdiana Yabansabra

NPP. 30.1443

*Asdaf Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah  
Email: ruthyabansabra@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Lina Marlina S.Pd, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problems that occur in the implementation of village development with a cash labor-intensive pattern in Jayapura Regency where the implementation of village development is still trying to optimize development so that it becomes an independent village. **Purpose:** The purpose of this study is to find out, analyze and describe the performance of one of the efforts to improve the performance of the State Civil Apparatus, which is bureaucratic reform. **Method:** This study uses a qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by observation, in-depth interviews (6 informants), and documentation. **Result:** the author's analysis as a whole, the performance of the Community Empowerment Office and Kampung Jayapura Regency can be said to be not good, it only needs to be optimally improved in several indicators. Judging from the 14 indicators from the theory used, there are 8 indicators that are inhibiting the performance of the Jayapura Regency Village Community Empowerment Service according to Dwiyanto's theory and Adisasmita's theory in accordance with procedures as happened in the field, although this is felt to be not maximally measured from the quality of organizational performance and there are still some obstacles which hinder the performance of these services such as lack of community participation, lack of employee discipline and the quality of human resources that need to be improved. **Conclusion:** The conclusion obtained by the authors in this study is that the performance of the Village Community Empowerment Service in the Implementation of Village Development with a Cash Labor-Intensive Pattern in Jayapura Regency, Papua Province, can be said to be quite good and still has to be optimized because the agency still has several obstacles so the authors suggest that the agency overcome the obstacles that become an obstacle to the performance of the service itself.

**Keywords:** Performance, Village Development, Cash Labor Intensive

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan kampung dengan pola padat karya tunai di Kabupaten Jayapura dimana pelaksanaan pembangunan kampung yang masih berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan agar menjadi kampung yang mandiri **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis dan mendeskripsikan mengenai kinerja salah satu upaya dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara yang merupakan reformasi birokrasi **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (6 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** analisis penulis secara keseluruhan, Kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayapura dapat dikatakan belum baik, hanya perlu dilakukan perbaikan secara optimal di beberapa indikator. Dilihat dari 14 indikator dari teori yang digunakan ada 8 indikator yang menjadi penghambat Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura menurut teori Dwiyanto dan Teori Adisasmita sesuai dengan prosedur sebagaimana terjadi di lapangan meskipun hal tersebut dirasa belum maksimal diukur dari kualitas kinerja organisasi dan masih adanya beberapa kendala yang menghambat kinerja dinas tersebut seperti partisipasi masyarakat yang kurang, disiplin pegawai yang kurang serta kualitas SDM yang perlu ditingkatkan. **Kesimpulan :** Kesimpulan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung Dengan Pola Padat Karya Tunai di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dapat dikatakan cukup baik dan masih harus dioptimalkan karena dinas tersebut masih memiliki beberapa hambatan sehingga penulis menyarankan dinas tersebut mengatasi kendala yang menjadi penghambat kinerja dinas itu sendiri

**Kata kunci:** Kinerja, Pembangunan Kampung, Padat Karya Tunai

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur negara, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman membuat masyarakat semakin kritis dalam memperhatikan lingkungan sekitarnya, terutama dalam menghadapi penyelenggaraan roda Pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mendukung jalannya roda Pemerintahan Indonesia.

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai berikut :

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Sejalan dengan maksud diatas, Pemerintahan di daerah sebagai bagian dari birokrasi yang ingin terus membangun dan meningkatkan manajemen Pemerintahannya terutama yang ditujukan kepada birokrasi publik, senantiasa menetapkan dalam setiap misi pembangunannya baik jangka Panjang maupun jangka pendek pada penguatan misi yaitu :

1. Mewujudkan kePemerintahan yang baik.
2. Tentram dan dinamis.
3. Meningkatkan kinerja pembangunan desa



Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah. Dalam hal ini Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat Kampung telah dilaksanakan pelimpahan kewenangan dalam mengelola dana yaitu Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Pemerintah pusat, dana Program Strategi Pembangunan Kampung (PROSPEK) dari Pemerintah Provinsi dan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari dana Kabupaten. Dalam rangka peningkatan kapasitas aparat Kampung untuk mengelola dana Kampung, Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan Padat Karya (Cash for Work). Dari program Padat Karya, Pemerintah pun telah menetapkan kebijakan pengupahan untuk program padat karya sebagai komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

berbagai permasalahan yang masih ada dalam penelitian ini dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kewenangan di Kabupaten Jayapura dapat diidentifikasi berdasarkan (RPJMD Kabupaten Jayapura tahun 2017-2022) pada bagian berikut ini.

1. Jangkauan dan kelayakan infrastruktur pemukiman dan perumahan  
Keterbatasan sarana dan prasarana dan jangkauan moda transportasi dalam menjangkau dan menghubungkan kawasan strategis serta pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah pembangunan,
2. Belum tersedianya jaringan air bersih di setiap Kampung.
3. Masih banyak rumah tidak layak huni yang ditinggali masyarakat.
4. Belum tersedianya jembatan penyebrangan dan tambatan perahu di daerah pesisir, daerah aliran sungai dan Kampung di sekitar Danau Sentani.
5. Belum optimalnya Peran Masyarakat Adat dan Kampung Adat Dalam Pembangunan.
6. Belum optimalnya fungsi-fungsi Kampung adat dalam penyelenggaraan pembangunan.
7. Belum adanya kepastian hukum tentang Kampung adat.
8. Belum adanya struktur Kampung adat.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu yang pertama Karmila (2019) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis Program Padat karya Tunai Di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Penelitian ini Tidak ada teori Metode penelitian Yang Digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan bahan melalui dokumen, meninjau, mengamati atau mempelajari studi normatif lainnya Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai Di Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang sudah melakukan sosialisasi secara optimal bahkan Pemerintah Desa juga menyampaikan langsung kepada masyarakat cara/proses pengerjaan program padat karya tunai. tahap pengkapisitan dalam pelaksanaannya sudah

menunjukkan bahwa Pemerintah desa sudah menentukan jenis kegiatan yang akan dikerjakan seperti pengecoran jalan tani, pembuatan rainase, pembuatan talud jalan, pembangunan pustu, dan pembuatan jamban. Namun di sisi lain dalam proses pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat Karya Tunai Menunjukkan bahwa Masyarakat desa belum sepenuhnya terberdayakan dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat yang kurang terhadap program padat karya tunai yang diadakan di Desa Tongkonan Basse. Penelitian kedua yaitu Dahliati, R. Radhyum, Ikonon, M. Nurhijadi, (2020), dengan judul Strategi Pengembangan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dengan Pendekatan Analisis SWOT Di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Teori yang digunakan Analisis Swot Siagian, metode yang digunakan Metode Kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang tepat untuk Melaksanakan program padat karya tunai desa (PKTD) di desa stowe berang kecamatan utan adalah strategi pemanfaatan dana desa untuk peningkatan kapasitas masyarakat agar memiliki kompetensi, strategi pemanfaatan dana desa dan tenaga pendamping profesional dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan strategi peningkatan koordinasi atau kerja sama antar Pemerintah desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat. Penelitian ketiga yaitu Risa, Hajar (2021) dengan judul Implementasi program padat karya tunai dari dana desa dalam mengatasi kemiskinan masyarakat desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli kabupaten Deli Serdang Teori yang digunakan yaitu Edwards III. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Padat Karya Tunai di desa Karang Gading hasilnya belum maksimal, komunikasi belum sepenuhnya tersampaikan, sumber daya belum cukup memadai, struktur birokrasi belum tertata dengan baik dan hanya dari aspek posisi yang sudah cukup memadai sehingga yang diinginkan belum tercapai.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung Dengan Pola Padat Karya Tunai Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Selain itu Teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian terdahulu yakni menggunakan teori dan pendapat menurut Agus Dwiyanto dan Adisasmita (2006) yang menyatakan bahwa dalam kinerja dan pembangunan desa perlu adanya Produktivitas, Kualitas Pelayanan Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas dan Prinsip-prinsip pembangunan desa. Sasaran pembangunan desa. Ruang lingkup Pembangunan Desa

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menganalisis bagaimana kinerja dinas pemberdayaan masyarakat Kampung dalam pelaksanaan pembangunan Kampung dengan pola padat karya tunai di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Dalam mengumpulkan data penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Distrik Sentani Barat, Sekretaris Kampung Maribu, Masyarakat (2 orang). Adapun analisisnya menggunakan Teori Agus Dwiyanto (2006) dan Adisasmita (2006) yang menyatakan bahwa dalam kinerja dan pembangunan desa perlu adanya Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas.



Responsibilitas.Akuntabilitas dan.Prinsip-prinsip pembangunan desa. Sasaran pembangunan desa. Ruang lingkup Pembangunan Desa

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis kinerja dinas pemberdayaan masyarakat kampung dalam pelaksanaan pembangunan kampung dengan pola padat karya tunai di Kabupaten Jayapura Menggunakan Teori dan pendapat menurut Agus Dwiyanto (2006) dan Adisasmita (2006) yang menyatakan bahwa dalam kinerja dan pembangunan desa perlu adanya Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas. Responsibilitas.Akuntabilitas dan.Prinsip-prinsip pembangunan desa. Sasaran pembangunan desa. Ruang lingkup Pembangunan Desa

#### **3.1. Produktivitas**

Produktivitas merupakan input atau hasil yang dicapai oleh suatu organisasi Pemerintahan dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi itu mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuan suatu organisasi tentu ada suatu proses agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi memiliki tahapan– tahapan yang harus dilewati, segala sesuatu yang ingin dicapai yang telah disusun sedemikian rupa dalam perancangan yang menjadi upaya dalam pencapaian tujuan itu memiliki proses sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan atau sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses pelaksanaan pembangunan Kampung dengan pola padat karya tunai di Kabupaten Jayapura yang memiliki beberapa tujuan dari pelaksanaan pembangunan Kampung dengan pola padat karya tunai yang merupakan program Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat Kampung dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi local untuk menambah pendapatan masyarakat serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Jayapura. Penulis menyimpulkan pengukuran terhadap produktivitas mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan pembangunan kampung dengan pola padat karya tunai tergolong cukup.

#### **3.2. Kualitas Layanan**

Kualitas layanan menjadi isu yang semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi Pemerintah. kualitas layanan sering sekali membentuk *image* masyarakat terhadap organisasi Pemerintah .Banyak *image negative* yang terbentuk mengenai organisasi Pemerintah muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Dinas Pemberdayan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura dalam menampung aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan Kampung dengan pola padat karya tunai sesuai dengan prosedur pelayanan kepada masyarakat. penulis menyimpulkan kualitas layanan di dinas tersebut melalui pengukuran kepuasan masyarakat dan prosedur pelayanan yang diberikan harus optimal.

#### **3.3. Responsivitas**

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda dan prioritas untuk pelayanan dan mengembangkan program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dari aspirasi masyarakat. Kebutuhan masyarakat sangat beragam sehingga aparat harus responsif dalam melayani berbagai karakteristik masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan khususnya mensejahterakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui pola padat karya tunai. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura sebagai organisasi Pemerintah yang melayani masyarakat secara langsung harus memiliki pejabat yang merespon permintaan masyarakat yang dilayani. Keramahan yang ditunjukkan oleh pihak yang berwenang akan mencerminkan sikap karakter dalam penyampaian layanan. Hal ini akan memberikan kesan berbeda kepada masyarakat

sebagai pemberi aspirasi. Karena keramahan petugas dalam melayani memiliki implikasi dalam menciptakan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat dalam pelayanan penyampaian. Keramahan petugas menjadi nilai lebih bagi penyedia layanan, petugas yang ramah dalam melayani masyarakat akan memberikan respon positif dari masyarakat sehingga tercipta suasana yang nyaman. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi Pemerintahan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura terhadap harapan. Keinginan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan public seperti menampung aspirasi masyarakat serta mengenali kebutuhan masyarakat, Menyusun agenda dan prioritas pelayanan. Penulis menyimpulkan bahwasannya responsivitas melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat tergolong cukup baik.

### **3.4 Responsibilitas**

Tanggung jawab menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi negara dilakukan sesuai dengan benar. Prinsip-prinsip administrasi harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi. Hal ini harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai instansi Pemerintah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Oleh karena itu, pegawai dituntut untuk dapat mematuhi berbagai aturan dan kebijakan yang berlaku. Responsibilitas yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi yang dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi. Dalam penyampaian pelayanan oleh organisasi public ketataaan terhadap peraturan adalah prinsip yang harus dilaksanakan sebagai referensi dalam pelayanan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura memiliki aturan yang diterapkan dalam mengendalikan aparat sehingga terus bekerja secara optimal dan tidak melakukan kecurangan

### **3.5 Akuntabilitas**

Akuntabilitas yang dimiliki organisasi public adalah kompatibilitas antara layanan yang diberikan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan berkembang di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan bahkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Kebijakan yang dibuat juga harus sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tugas seorang Aparatur Sipil negara adalah melaksanakan kebijakan public yang dibuat pejabat Pembina pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan public yang profesional dan berkualitas. Sebagaimana Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Jayapura Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

### **3.6 Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dalam peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa Pembangunan pedesaan harusnya menerapkan prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas) dan berkelanjutan (sustainable). Penulis menyimpulkan prinsip-prinsip pembangunan desa di Kabupaten Jayapura tergolong cukup

### **3.7 Sasaran Pembangunan Desa**

Sasaran pembangunan pedesaan yaitu untuk terciptanya peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa



dan partisipasi masyarakat serta perkuatan kelembagaan. Pembangunan desa tentunya mempunyai peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Seluruhnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat, karena lebih dari 80% penduduk bermukim dan hidup di wilayah pedesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pedesaan adalah sebagai berikut:

- a. Ditatanya kembali desa sehingga dapat menjalankan fungsinya menurut semestinya.
- b. Berfungsinya aparat, kelembagaan dan kepemimpinan desa.
- c. Meningkatnya kemampuan prasarana fisik dan perekonomian pedesaan.
- d. Terciptanya lapangan kerja baru di pedesaan.
- e. Ditemukan dan dikembangkan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produktivitas.
- f. Terwujudnya program keterkaitan dalam berusaha pada berbagai aspek kehidupan ekonomi.
- g. Tumbuhnya kehidupan masyarakat desa yang mandiri

Dalam hal ini penulis menyimpulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura dalam mencapai sasaran pembangunan desa tergolong cukup dengan partisipasi masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan desa.

### **3.8 Ruang Lingkup Pembangunan Desa**

Pembangunan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan, pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan (interurban-urban relationship). Pembangunan sarana dan prasarana Kampung meliputi penyediaan pelayanan dasar termasuk penyediaan air minum, sanitasi, listrik, perumahan, aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal, pengendalian banjir serta peningkatan keselamatan transportasi Infrastruktur untuk mendukung sektor unggulan yang ada di Kampung Dalam penelitian ini penulis mengukur pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Jayapura dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kampung guna mencapai sasaran pembangunan Kampung. Potensi Desa adalah sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa sebagai dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk kelangsungan dan kemajuan desa dan masyarakatnya. Contoh sumber daya alam yang ada di desa seperti lahan kosong, sungai embung, hutan, pegunungan, dan lain-lain. Sedangkan Contoh sumber daya manusia yang ada di desa seperti Tenaga, Kader Posyandi, Kader Pertanian, Tersedianya SDM yang memadai, dan lain-lain. Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Jayapura. sangatlah melimpah, banyak lahan kosong dan tingkat kesuburan tanah yang sangat baik, selain itu Kabupaten Jayapura telah memanfaatkan lahannya sebanyak 18.998 Ha. Produksi terbesar komoditas tanaman pangan adalah ubi Jalar, kemudian padi, Ubi Kayu, Jagung, Keladi, Kedelai, Kacang Tanah dan Kacang Hijau. Saat ini Kabupaten Jayapura memiliki 386.700 Ha lahan yang cocok untuk proses budidaya kakao. memiliki sejumlah keunggulan yang cukup potensial dan diperhitungkan baik dari sektor pariwisata, industri, pertanian, maupun perkebunan. Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 25 tahun kedepan adalah bagaimana mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai sesuatu yang prioritas dan utama di Kabupaten Jayapura untuk ekonomi kerakyatan, pariwisata menjadi salah satu sektor yang akan didorong, sehingga dampak dari perekonomian masyarakat di Kabupaten ini bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini penulis menyimpulkan potensi

desa yang ada di Kabupaten Jayapura tergolong cukup untuk mendukung program padat karya tunai agar dapat menjadi desa mandiri.

### **3.9. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan pembangunan kampung dengan pola padat karya tunai memberikan banyak dampak positif dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan ini juga merupakan sarana pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kabupaten Jayapura. Penulis menemukan temuan penting yaitu masyarakat berpartisipasi cukup baik dalam program padat karya tunai dikarenakan adanya kolaborasi yang baik antar Pemerintah setempat dengan kalangan masyarakat dan dinas terkait berusaha menyediakan fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya yang menjadi karakteristik dalam program padat karya tunai ini diadakan langsung oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah serta Dinas terkait akan lebih banyak mengetahui apa saja kendala-kendala dalam program ini serta apa saja yang dibutuhkan dalam program ini sehingga nantinya program pemberdayaan masyarakat kampung melalui padat karya tunai ini bisa tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap kendala yang terjadi pasti ada upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura yaitu dengan melakukan pembinaan dan pendampingan secara rutin dan intens serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan kampung melalui padat karya tunai di Kabupaten Jayapura. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan kemandirian terhadap masyarakat sehingga akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Seperti halnya dengan penelitian Karmila, 2019 dimana Pemerintah Desa berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara optimal. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat sering kali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan pelaksanaan pembangunan ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar menjadi kampung mandiri.

### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan kampung dengan pola padat karya tunai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura sejauh ini sudah cukup baik ditandai dengan. Kegiatan-kegiatan yang diadakan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung edukasi, sosialisasi pembinaan dan pendampingan. Walaupun pelaksanaan pembangunan dilakukan kampung dengan pola padat karya tunai tergolong baik tentunya masih adanya hambatan yang harus diperhatikan dan segera diatasi. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura dalam mengatasi kendala yang menghambat kinerja dinas tersebut dalam melaksanakan pembangunan Kampung dengan pola padat karya tunai adalah dengan melaksanakan sosialisasi ulang tentang program padat karya tunai di Kampung-Kampung serta melakukan diklat dan pelatihan bagi pegawai di dinas tersebut agar dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang tergolong singkat sedangkan permasalahan yang diteliti tergolong kompleks.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program padat karya tunai melalui pembinaan dan pendampingan di Kabupaten Jayapura untuk menemukan hasil yang mendalam



## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Herry,*Manajemen Kinerja*(Yogyakarta:Gava Media,2020)

Sugiyono ,*Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung :Alfabeta,2013)

Muhammad Busro,*Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta:Prenadamedia Group,2018)

Hamzah B.Uno,Nina Lamatengo,*Teori Kinerja Dan Pengukurannya* (Jakarta:Bumi Aksara,2014)

Irham Fahmi ,*Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi* (Bandung:Alfabeta,2021)

Agus Dwiyanto,*Reformasi Birokrasi Publik DI Indonesia* (Yogyakarta : Gadjadara University Press,2006)

Adib ,*Padat Karya Tunai Di Desa* (Yogyakarta : DEEPUBLISH,2020)

Karmila.(2019) ” *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Program Padat*

*Karya Tunai Di Desa Tongkonon Basse Kecamatan Masalle Kabupaten Enkerang*” .Skripsi

Universitas Muhamadiyah. Makasar. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10160-](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10160-Full_Text.pdf)

[Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10160-Full_Text.pdf)

Dahliati.,RadyumIkono.,M.Nurjihadi.(2020) “*Strategi Pengembangan*

*Program Padat Karya Tunai Desa(PKTD) Dengan Pendekatan Analisis SWOT Di Desa Stowe*

*Brang Kecamatan Utan*” . Jurnal Tambora Volume 2 Nomor 2A

<https://www.neliti.com/id/publications/328691/strategi-pengembangan-program-padat-karya-tunai-desa-pktd-dengan-pendekatan-anal>

Risa ,.Hajar .(2021) “Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana

*Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang” . Jurnal Perspektif ,10(2)*

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/45595>

RPJMD Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022

<https://www.jogloabang.com/desa/permendesa-pdtt-7-2021-bprioritaspenggunaan-dana-desa-2022>

Padat Karya Tunai Dana Desa Direalokasi Untuk Covid-19

<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3209/selain-padat-karya-tunai-dana-desa-direalokasi-untuk-covid-19>

